

**UNIT AKUNTANSI KUASA
PENGUNAN ANGGARAN
KANTOR OTORITAS BANDAR
UDARA WILAYAH V MAKASSAR**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

Jl. Otoritas Bandara No. 5
Makassar

KATA PENGANTAR

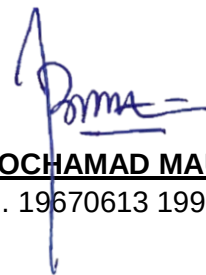
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar salah satu entitas akuntansi dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel serta berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Makassar, April 2026
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



MOCHAMAD MAULUDIN
NIP. 19670613 199112 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan Keuangan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	41
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
F. Pengungkapan Penting Lainnya	54
VI. Lampiran dan Daftar	



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V MAKASSAR**

JL. OTORITAS BANDARA NO. 5
MAROS, SULAWESI SELATAN 90552

TELP : (0411) 3656222
: (0411) 3656222

FAX : (0411) 3656221
Email : otban_wil.v@dephub.go.id
Website : www.otban5.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Makassar, April 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

MOCHAMAD MAULUDIN

NIP. 19670613 199112 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar Unaudited Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara Unaudited TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 36.385.147.232,- atau mencapai 1270 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 2.864.491.000,-.

Realisasi Belanja Negara Unaudited TA 2025 adalah sebesar Rp. 45.648.527.785,- atau mencapai 77.95 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 58.557.620.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 24.424.348.989.337,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 24.424.348.989.337,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,- Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 24.108.601.665 dan Rp. 24.400.240.387.672,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 17.646.442.046,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 48.129.671.294,- Sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (30.483.229.248). Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp. 3.815,- dan Rp. (30.483.225.433) Sehingga Surplus/ Defisit-LO sebesar Rp. (30.483.225.433,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 24.421.460.232.552,- dikurangi Surplus/ Defisit-LO sebesar Rp. (30.483.225.433,-). kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 9.263.380.553,- sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 24.400.240.387.672,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V MAKASSAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Tahun 2025		% thd	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI	Angg	REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2,864,491,000	36,385,147,232	1270	8,899,367,771
JUMLAH PENDAPATAN		2,864,491,000	36,385,147,232	1270	8,899,367,771
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	28,498,655,000	28,384,677,090	100	24,875,193,515
Belanja Barang	B.4	29,137,765,000	16,343,163,328	56	25,766,047,956
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	0	-
Jumlah Belanja Operasi		57,636,420,000	44,727,840,418	78	50,641,241,471
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	-	-	0	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	921,200,000	920,687,367	0	23,332,200
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	0	383,000,000
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	0	983,606,181
Belanja Modal lainnya	B.10	-	-	0	-
Jumlah Belanja Modal		921,200,000	920,687,367	0	1,389,938,381
Pengembalian Belanja			-		
Jumlah		921,200,000	920,687,367	0	
JUMLAH BELANJA		58,557,620,000	45,648,527,785	78	52,031,179,852

II. NERACA

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V MAKASSAR NERACA PER 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.4	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.5	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.6	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.8	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	24,371,699,525,000	24,371,699,525,000
Peralatan dan Mesin	C.15	57,187,141,591	56,266,454,224
Peralatan dan Mesin Belum diregister	C.16	-	-
Gedung dan Bangunan	C.17	49,590,666,913	49,590,666,913
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.18	48,159,798,956	48,159,798,956
Aset Tetap Lainnya	C.19	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.20	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.21	-102,288,143,123	-98,886,312,247
Jumlah Aset Tetap		24,424,348,989,337	24,426,830,132,846
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.22	0	0
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.23	-	-
Aset Lain-Lain	C.24	41,870,000	41,870,000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	-41,870,000	-41,870,000
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		24,424,348,989,337	24,426,830,132,846
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.26	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	-	-
Utang yang Belum Ditagihkan	C.28	-	-
Pendapatan diterima dimuka	C.29	24,108,601,665	5,369,900,294
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		24,108,601,665	5,369,900,294
JUMLAH KEWAJIBAN		24,108,601,665	5,369,900,294
EKUITAS			
Ekuitas	C.30	24,400,240,387,672	24,421,460,232,552
JUMLAH EKUITAS		24,400,240,387,672	24,421,460,232,552
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24,424,348,989,337	24,426,830,132,846

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V MAKASSAR LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	17,646,442,046	4,892,510,899
JUMLAH PENDAPATAN		17,646,442,046	4,892,510,899
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	28,384,677,090	24,875,193,515
Beban Persediaan	D.3	33,037,596	160,069,005
Beban Jasa	D.4	8,531,833,628	13,493,866,432
Beban Pemeliharaan	D.5	3,728,176,215	5,359,199,696
Beban Perjalanan Dinas	D.6	4,050,115,889	6,793,630,599
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	3,401,830,876	5,676,904,624
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		48,129,671,294	56,358,863,871
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(30,483,229,248)	(51,466,352,972)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	(6,034,819)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	26,525,000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	32,559,819
Surplus/ Defisit dari kegiatan non operasional lainnya		3,815	185,467
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3,815	185,467
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		3,815	(5,849,352)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(30,483,225,433)	(51,472,202,324)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(30,483,225,433)	(51,472,202,324)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	24,420,460,232,552	24,430,190,376,684
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	-30,483,225,433	-51,472,202,324
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	(1,389,753,889.00)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3	-	-
KOREKSI ASET TETAP	E.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	(1,389,753,889)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		9,263,380,553	43,131,812,081
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.7	-21,219,844,880	-9,730,144,132
EKUITAS AKHIR		24,399,240,387,672	24,420,460,232,552

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar didirikan sebagai salah satu Upaya pemerintan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP. 007/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akunransi dan Pelaporan Keuangan Entitas. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang

bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan(*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual

dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan

bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan

Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis AkruaI
Pertama kali*

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp.
36.385.147.232,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 36.385.147.232,- atau mencapai 1.270 % dari estimasi Pendapatan sebesar Rp. 8.899.367.771,-. Pendapatan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	2,864,491,000	36,385,147,232	1,270
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	2,864,491,000	36,385,147,232	1,270

Realisasi Pendapatan Jasa *Audited* Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 178 persen dibandingkan Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	36,385,147,232	8,899,367,771	309
Pendapatan Lain-lain	-	-	
Jumlah	36,385,147,232	8,899,367,771	309

Realisasi Belanja
Negara
Rp45.648.527.785,-

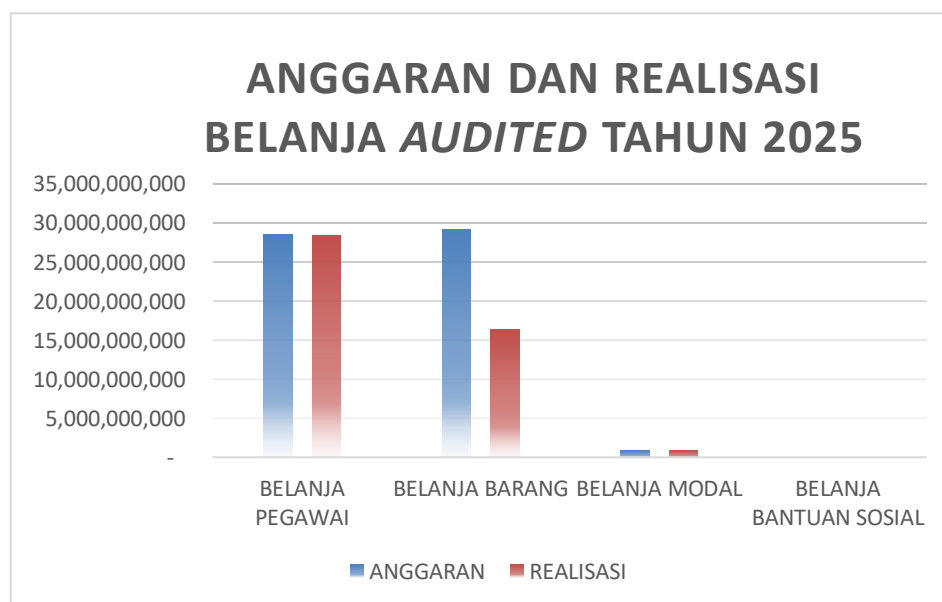
B.2. Belanja

Realisasi Belanja pada *Audited* Tahun 2025 adalah sebesar Rp 45.648.527.785,- atau 77.95% dari anggaran belanja sebesar Rp 58.557.620.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja *Audited* Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Tahun 2025

URAIAN	31 Desember 2025		
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI ANGG. (%)
Belanja Pegawai	28,498,655,000	28,384,677,090	99.60
Belanja Barang	29,137,765,000	16,343,163,328	56.09
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	921,200,000	920,687,367	99.94
Jumlah Belanja Kotor	58,557,620,000	45,648,527,785	77.95
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	58,557,620,000	45,648,527,785	77.95

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Tahun 2024, Realisasi Belanja Tahun 2025 mengalami Kenaikan sebesar 19.63 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	28,384,677,090	24,875,193,515	14.11
Belanja Barang	16,343,163,328	25,766,047,956	(36.57)
Belanja Bantuan Sosial	920,687,367	1,389,938,381	(33.76)
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	45,648,527,785	52,031,179,852	(12.27)

Belanja Pegawai
Rp 28.384.677.090,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai *Audited* 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 28.384.677.090,- dan Rp 24.875.193.515,-.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 14.11% dari realisasi belanja Tahun 2024.

Perbandingan Belanja Pegawai Audited Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10,653,568,321	10,024,490,634	6.28
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1,367,865,157	65,366,083	
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	248,205,000	900,997,000	(72.45)
Belanja Tunjangan Khusus	16,115,218,962	13,885,126,833	16.06
Jumlah Belanja Kotor	28,384,857,440	24,875,980,550	14.11
Pengembalian Belanja Pegawai	180,350	787,035	-
Jumlah Belanja Pegawai	28,384,677,090	24,875,193,515	14.11

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp.16.343.163.328,
-

Realisasi Belanja Barang *Audited* Tahu 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 16.343.163.328,- dan Rp 25.766.047.956,- Realisasi Belanja Barang Unaudited Tahu 2025 mengalami Penurunan 36.57 % dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2024.

Perbandingan Belanja Barang Audited Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2,414,383,320	5,502,962,151	(56.13)
Belanja Barang Non Operasional	4,492,955,442	5,665,616,049	(20.70)
Belanja Barang Persediaan	64,239,141	194,735,181	(67.01)
Belanja Jasa	1,624,494,866	2,325,288,232	(30.14)
Belanja Pemeliharaan	3,696,974,670	5,283,815,744	(30.03)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4,050,115,889	6,793,630,599	(40.38)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	16,343,163,328	25,766,047,956	(36.57)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	16,343,163,328	25,766,047,956	(36.57)

Belanja Bantuan
Sosial Rp. 0

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial *Audited* Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar pada 2025 dan 2024 tidak memiliki Belanja Bantuan Sosial.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Audited Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Kelompok Pendidikan Jaya Maju	-	-	-
Kelompok Pendidikan Cenderawasih	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal
Tanah Rp. 0,-

B.6 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar pada 2025 dan 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Audited Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	2025	2024	Naik (Turun) %
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp.920.687.367,-

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 920.687.367-, dan Rp. 23.332.200,- mengalami penurunan sebesar (3.846) %, hal ini disebabkan adanya pengurangan belanja peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Audited Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	2025	2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	920,687,367	23,332,200	(3,846)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-		
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-		
	-	-	
Jumlah Belanja Kotor	920,687,367	23,332,200	(3,846)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	920,687,367	23,332,200	(3,846)

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0,-

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 383.000.000,- Realisasi Belanja Modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Audited Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung & Bangunan	-	383,000,000	
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja	-	383,000,000	

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp 0,-

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan *Audited* Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 983.606.181.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Audited Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	2025	2024	Naik (Turun)
Belanja Modal JIJ	0	983,606,181	
Jumlah Belanja Kotor	0	983,606,181	
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	983,606,181	

Belanja Modal
Lainnya Rp.0,-

B.10 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal *Audited* Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

Belanja Modal Lainnya Audited Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	2025	2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp 0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	2025	2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp 0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	2025	2024
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp 0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	2025	2024
Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak
Rp 0,-

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNPB per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemersintah sebagai uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	2025	2024
Piutang Bukan Pajak	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR
Rp 0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Nama	2025	2024
		-	-
		-	-
		-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar TPA
Rp 0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	2025	2024
1			
2			
3			
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih - Piutang
Jangka Pendek
Rp 0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-		-
Kurang Lancar	-		-
Diragukan	-		-
Macet	-		-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-		-
Kurang Lancar	-		-
Diragukan			-
Macet			-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-		-
Kurang Lancar	-		-
Diragukan			-
Macet			-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka
Rp 0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara

penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	2025	2024
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sea Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp.0,-

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan

Persediaan	2025	2024
Barang Konsumsi		0
Barang untuk Pemeliharaan		0
Suku Cadang	-	-
Pita Cukai, Materai, Leges	-	-
Bahan Baku	0	-
Persediaan Lainnya	-	
Jumlah	-	-

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR
Rp 0

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	2025	2024
Jumlah		-	-

TPA Rp 0

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan Penjualan Angsuran

No	Debitur	2025	2024
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih - Piutang Bukan
Pajak
Rp 0,-

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp (0) dan Rp(0). Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Tanah
Rp 24.371.699.525.000,-

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 24.371.699.525.000,- dan Rp 24.371.699.525.000,-. Kenaikan nilai aset tetap Tanah berasal dari hasil penilaian kembali (Revaluasi Aset). Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan	24,371,699,525,000
Mutasi tambah:	
Hasil Revaluasi Aset	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2025	24,371,699,525,000

Peralatan dan Mesin
Rp 57.187.141.591,-

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 57.187.141.591,- dan Rp 56.266.454.224,-.

Saldo Nilai Perolehan 2024	56,266,454,224
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	0
Penambahan	920,687,367
Mutasi kurang:	0
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2025	57,187,141,591
Nilai Buku per 31 Desember 2025	57,187,141,591

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp 49.590.666.913,-

C.15 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 49.590.666.913,- dan Rp 49.590.666.913,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 2023	49,590,666,913
Pengurangan	
Penyusutan	-
Penambahan	-
Saldo per 30 Juni 2024	49,590,666,913
Nilai Buku per 30 Juni 2024	49,590,666,913

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp.48.159.798.956,-

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 48.159.798.956,- dan Rp 48.159.798.956,- Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 2024	48,159,798,956
Mutasi tambah:	-
Pembangunan JIJ	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	48,159,798,956
Nilai Buku per 31 Desember 2025	48,159,798,956

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp 0,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 0,- dan Rp 0,-. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 2024	-
Mutasi tambah:	-
Aset Tetap Lainnya	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp 0,-

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Mutasi transaksi terhadap Konstruksi pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 2024	-
Mutasi tambah:	
KDP	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(102.288.143.123,-)

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp (102.288.143.123,-) dan Rp (98.886.312.247,-) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan

berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	57,187,141,591	54,398,091,405	2,789,050,186
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	49,590,666,913	8,649,464,818	40,941,202,095
3	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	41,651,226,050	35,979,408,272	5,671,817,778
4	Akumulasi Penyusutan Irigasi	5,979,891,181	2,979,648,020	3,000,243,161
5	Akumulasi Penyusutan Jaringan	528,681,725	281,530,608	247,151,117
	Akumulasi Penyusutan	154,408,925,735	102,288,143,123	52,649,464,337

Aset Tak Berwujud
Rp.0,-

C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 0,- dan Rp 0,-

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Ototitas Bandar Udara Wilayah V Makassar berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Dalam transaksi ini tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Saldo Nilai Perolehan 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Aset Lain-Lain Rp
41.870.000,-

C.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 41.870.000,- dan Rp 41.870.000,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional kantor serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan 2024	41,870,000
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	41,870,000
Nilai Buku per 31 Desember 2025	41,870,000

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(41.870.000,-)

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp(41.870.000,-) dan Rp(41.870.000,-). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	-41,870,000	-41,870,000	0
Akumulasi Amortisasi Software	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Jumlah	(41,870,000)	(41,870,000)	0

Uang Muka dari KPPN
Rp 0,-

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp. 0,-

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan Gaji dan Tunjangan Kinerja, yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

C.25 Utang Yang Belum Ditagihkan

*Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp 0,-*

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0,-

C.26 Pendapatan Diterima Dimuka

*Pendapatan Diterima
Dimuka Rp
24.108.601.665,-*

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp.24.108.601.665,- dan Rp. 5.369.900.294,-. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

C.27 Ekuitas

*Ekuitas
Rp24.400.240.387.672,-*

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 24.400.240.387.672,- dan Rp 24.421.460.232.552,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB
Rp
17.646.442.046,-

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 17.646.442.046,- dan Rp 4.892.510.899,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025	2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin	-	26,525,000	(100)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14,781,532,290	2,056,700,899	619
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarna Sesuai dengan Tusi	134,019,756	-	100
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	2,557,640,000	2,669,110,000	(4)
Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	-	-	-
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	173,250,000	166,700,000	4
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
Pendapatan Denda Lainnya	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	-	-
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	-	-	-
koreksi lainnya	-	-	-
Jumlah	17,646,442,046	4,919,035,899	259

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan) merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari sewa barang milik negara. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari hasil penjualan barang milik Negara, Pendapatan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi bidang Perhubungan merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari kegiatan tugas dan fungsi dari Kantor Otoritas Bandara Wilayah V Makassar, Pendapatan Jasa Kebandarudaraan merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Jasa terkait kebandarudaraan.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 28.384.677.090,- dan Rp 24.875.193.515,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, dan Aparatur Sipil Negeri (ASN) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	10,653,568,321.	10,024,460,634.	6
Beban Gaji Pokok PPPK	1,367,865,157.	65,366,083.	1,993
Belanja Lembur	248,205,000.	900,997,000.	(72)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	16,115,218,962.	13,885,126,833.	16
Jumlah	28,384,857,440	24,875,950,550	14
Pengembalian	180,350	787,035	-
Jumlah Beban Persediaan	28,384,677,090	24,875,163,515	14

Beban Persediaan
Rp 33.037.596,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 33.037.596,- dan Rp 160.069.005,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	2024	NAIK (TURUN) %
Barang Konsumsi	33,037,596	160,069,005.	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
		-	-
		-	-
Jumlah Beban Persediaan	33,037,596	160,069,005	(79)

Beban Barang dan
Jasa
Rp8.531.833.628,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.531.833.628,- dan Rp. 13.493.866.432,- Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1,758,681,752.	3,909,862,195.	-55.02
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	33,801,554	50,037,358	0.00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0	
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	183,312,000.	151,728,000.	20.82
Beban Barang Operasional Lainnya	438,588,014.	1,391,334,598.	-68.48
Beban Bahan	2,842,716,442.	1,542,573,882.	84.28
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0.	0.	0.00
Beban Honor Output Kegiatan	0.	16,320,000.	-100.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,650,239,000.	4,106,722,167.	-59.82
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	0.	0.	0.00
Beban Langganan Listrik	671,382,164.	963,489,311.	-30.32
Beban Langganan Telepon	1,281,384.	24,293,421.	-94.73
Beban Jasa Lainnya	0.	0.	0.00
Beban Langganan Air	90,598,200.	83,971,500.	7.89
Beban Langgann Daya dan Jasa Lainnya	685,973,118.	452,334,000.	51.65
Beban Jasa- Penanganan Pandemi COVID-19	0.	0.	0.00
Beban Jasa Konsultan	0.	50,000,000.	-100.00
Beban Sewa	175,260,000.	751,200,000.	-76.67
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin		0.	0.00
Jumlah	8,531,833,628	13,493,866,432	-36.77

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp3.728.176.215,-

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3.728.176.215,- dan Rp 5.359.199.696,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,026,719,889.	3,004,562,604	(32.55)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,670,254,781	2,279,253,140	(26.72)
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	0	#VALUE!
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	31,201,545.	75,383,950	(58.61)
Jumlah Beban	3,728,176,215	5,359,199,694	(30.43)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp4.050.115.889,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 4.050.115.889,- dan Rp 6.793.630.559,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	3,773,148,669.	5,914,970,599	(36.21)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	127,115,000.	379,160,000	(66.47)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	149,852,220	499,500,000	-
Beban Perjalanan Biasa- Luar Negeri		-	-
Jumlah Beban	4,050,115,889	6,793,630,599	(40.38)

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp 0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	-
Jumlah Beban	0	0	-

Beban Bantuan
Sosial Rp 0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial	0	0	-
Jumlah Beban	0	0	-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.3.401.830.876,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 3.401.830.876,- dan Rp 5.676.904.624,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,364,795,224.	1,929,828,207.	(29.28)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,104,946,684.	1,101,116,684.	0.35
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	516,145,943.	2,345,279,142.	(77.99)
Beban Penyusutan Irigasi	404,684,998.	289,422,563.	39.82
Beban Penyusutan Jaringan	11,258,027.	11,258,028.	(0.00)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	0	
Jumlah Beban	3,401,830,876	5,676,904,624	(40.08)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	-
Jumlah Beban	0	0	-

Beban Lain-lain
Rp0

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	-
Jumlah Beban	0	0	-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.3.815,-

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing sebesar Rp. 3.815 dan Rp. (5.849.352,-) terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025	2024	NAIK (TURUN) %
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset	-	(6,034,819)	-
Pendapatan Pelepasan Aset	-	26,525,000	-
Beban Pelepasan Aset	-	32,559,819	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional lainnya	3,815	185,467	(98)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,815	185,467	(98)
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	3,815	185,467	(98)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
			-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	3,815	(5,849,352)	(100)

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025	2024	NAIK (TURUN) %
Pos Luar Biasa	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp
24.421.460.232.552,-*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 24.421.460.232.552,- dan Rp 24.431.190.376.684,-

*Surplus/ Defisit LO
Rp(30.483.225.433,-)*

E.2 Surplus/ Defisit LO

Jumlah Surplus/ Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp (30.483.225.433,-) dan Rp (51.472.202.324,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp 0,-*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai akibat penerapan kebijakan akhir.

*Koreksi Nilai Persediaan
Rp 0,-*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

*Koreksi Atas Reklasifikasi
Rp 0,-*

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Reklas merupakan koreksi atas nilai Reklas yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklas yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai Reklas untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

Selisih Revaluasi Aset
Rp(0)

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Selisih Revaluasi Aset merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas Revaluasi aset pada laporan keuangan. selisih revaluasi aset tetap untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp.0,-.

Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi Rp (0),-

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan Nilai Aset Non Revaluasi yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Nilai Aset Non Revaluasi untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,- dan Rp. 0,-.

Koreksi Lain-Lain Rp 0,-

E.3.6 Koreksi Lain- Lain

Koreksi Lain Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 24.431.190.376.684 koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, Antara lain Koreksi atas Pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas
Rp 9.263.380.553,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp. 9.263.380.553,- dan Rp. 43.131.812.081,-. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Ekuitas Akhir
Rp.24.400.240.387.672,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 24.400.240.387.672,- dan Rp 24.421.460.232.552,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2025 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar Nomor: SK. 2024 TAHUN 2025 Tentang Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar pada tanggal 20 Mei 2026 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Capt. M. Mauludin
Pejabat Pembuat Komitmen	: Muhammad Sailan
Pejabat Penandatangan/ Penguji SPM	: Sari Jumiarti
Bendahara Pengeluaran	: Eryyany
Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	: M. Irwan Tasrim

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V 465672

Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM
Tgl Cetak : 30/04/26 9:08 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,864,491,000	36,385,147,232	33,520,656,232	1270.21	5,000,310,000	8,899,367,771	3,899,057,771	177.98
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,864,491,000	36,385,147,232	33,520,656,232	1270.21	5,000,310,000	8,899,367,771	3,899,057,771	177.98
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	2,864,491,000	36,385,147,232	33,520,656,232	1270.21	5,000,310,000	8,899,367,771	3,899,057,771	177.98
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	58,557,620,000	45,648,527,785	(12,909,092,215)	77.95	54,774,772,000	52,031,179,852	(2,743,592,148)	94.99
1. Belanja Pegawai	28,498,655,000	28,384,677,090	(113,977,910)	99.60	24,890,248,000	24,875,193,515	(15,054,485)	99.94
2. Belanja Barang	29,137,765,000	16,343,163,328	(12,794,601,672)	56.09	27,494,524,000	25,766,047,956	(1,728,476,044)	93.71
3. Belanja Modal	921,200,000	920,687,367	(512,633)	99.94	2,390,000,000	1,389,938,381	(1,000,061,619)	58.16
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V 465672

Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM
Tgl Cetak : 30/04/26 9:08 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	58,557,620,000	45,648,527,785	(12,909,092,215)	77.95	54,774,772,000	52,031,179,852	(2,743,592,148)	94.99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Maros, 30 April 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


MOCHAMAD MAULUDIN
Pembina Utama Muda IV/c

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1900
SATUAN KERJA : 465672
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
SULAWESI SELATAN
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/26 10:14 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 30/4/26 8:06 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	9,286,099,000	7,792,099,000	7,791,948,900	0	7,791,948,900	100	150,100
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	103,000	128,000	116,676	350	116,326	90.88	11,674
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	484,620,000	510,974,000	510,741,630	0	510,741,630	99.95	232,370
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	161,142,000	171,062,000	170,883,480	0	170,883,480	99.9	178,520
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	103,810,000	99,410,000	99,335,000	0	99,335,000	99.92	75,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	40,560,000	33,000,000	32,880,000	180,000	32,700,000	99.09	300,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,005,000	38,977,000	38,517,515	0	38,517,515	98.82	459,485
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	444,657,000	444,370,000	444,369,120	0	444,369,120	100	880
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,559,061,000	1,208,300,000	1,174,876,000	0	1,174,876,000	97.23	33,424,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	409,865,000	389,935,000	389,900,000	0	389,900,000	99.99	35,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	12,491,922,000	10,688,255,000	10,653,568,321	180,350	10,653,387,971	99.67	34,867,029
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	41,530,000	930,145,000	930,143,900	0	930,143,900	100	1,100
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,000	32,000	18,047	0	18,047	56.4	13,953
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,151,000	51,957,000	51,910,860	0	51,910,860	99.91	46,140
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	829,000	18,596,000	18,511,090	0	18,511,090	99.54	84,910
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	7,560,000	7,560,000	0	7,560,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,041,000	65,396,000	65,395,260	0	65,395,260	100	740
511628	Belanja Uang Makan PPPK	8,436,000	238,417,000	233,441,000	0	233,441,000	97.91	4,976,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	2,590,000	61,280,000	60,885,000	0	60,885,000	99.36	395,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	68,140,000	1,373,383,000	1,367,865,157	0	1,367,865,157	99.6	5,517,843
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	800,000,000	251,737,000	178,213,000	0	178,213,000	70.79	73,524,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	8,000,000	70,000,000	69,992,000	0	69,992,000	99.99	8,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	808,000,000	321,737,000	248,205,000	0	248,205,000	77.15	73,532,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	14,251,872,000	14,971,677,000	14,971,616,709	0	14,971,616,709	100	60,291
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	62,180,000	1,143,603,000	1,143,602,253	0	1,143,602,253	100	747
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	14,314,052,000	16,115,280,000	16,115,218,962	0	16,115,218,962	100	61,038
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	27,682,114,000	28,498,655,000	28,384,857,440	180,350	28,384,677,090	99.6	113,977,910
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1900
SATUAN KERJA : 465672
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
SULAWESI SELATAN
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/26 10:14 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 30/4/26 8:06 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,375,100,000	4,238,400,000	1,758,681,752	0	1,758,681,752	41.49	2,479,718,248
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	18,810,000	33,810,000	33,801,554	0	33,801,554	99.98	8,446
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	185,352,000	198,312,000	183,312,000	0	183,312,000	92.44	15,000,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,020,041,000	1,168,141,000	438,588,014	0	438,588,014	37.55	729,552,986
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	4,611,303,000	5,650,663,000	2,414,383,320	0	2,414,383,320	42.73	3,236,279,680
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	2,159,010,000	3,520,399,000	2,842,716,442	0	2,842,716,442	80.75	677,682,558
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	52,920,000	39,960,000	0	0	0	0	39,960,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,028,455,000	5,769,000,000	1,650,239,000	0	1,650,239,000	28.61	4,118,761,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	6,240,385,000	9,329,359,000	4,492,955,442	0	4,492,955,442	48.16	4,836,403,558
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	154,029,000	154,029,000	64,239,141	0	64,239,141	41.71	89,789,859
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	154,029,000	154,029,000	64,239,141	0	64,239,141	41.71	89,789,859
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	996,000,000	672,221,000	671,382,164	0	671,382,164	99.88	838,836
522112	Belanja Langganan Telepon	38,400,000	1,400,000	1,281,384	0	1,281,384	91.53	118,616
522113	Belanja Langganan Air	102,000,000	90,600,000	90,598,200	0	90,598,200	100	1,800
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	576,000,000	687,464,000	685,973,118	0	685,973,118	99.78	1,490,882
522131	Belanja Jasa Konsultan	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
522141	Belanja Sewa	799,080,000	799,080,000	175,260,000	0	175,260,000	21.93	623,820,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,561,480,000	2,300,765,000	1,624,494,866	0	1,624,494,866	70.61	676,270,134
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,302,805,000	2,026,827,000	2,026,719,889	0	2,026,719,889	99.99	107,111
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,027,130,000	2,351,053,000	1,670,254,781	0	1,670,254,781	71.04	680,798,219
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	4,329,935,000	4,377,880,000	3,696,974,670	0	3,696,974,670	84.45	680,905,330
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,674,795,000	4,671,938,000	3,773,148,669	0	3,773,148,669	80.76	898,789,331
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	510,000,000	490,450,000	127,115,000	0	127,115,000	25.92	363,335,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,858,897,000	1,584,668,000	149,852,220	0	149,852,220	9.46	1,434,815,780
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	578,013,000	578,013,000	0	0	0	0	578,013,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	10,621,705,000	7,325,069,000	4,050,115,889	0	4,050,115,889	55.29	3,274,953,111
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	28,518,837,000	29,137,765,000	16,343,163,328	0	16,343,163,328	56.09	12,794,601,672
53	BELANJA MODAL							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1900
SATUAN KERJA : 465672
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
SULAWESI SELATAN
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/26 10:14 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 30/4/26 8:06 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	332,100,000	921,200,000	920,687,367	0	920,687,367	99.94	512,633
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	332,100,000	921,200,000	920,687,367	0	920,687,367	99.94	512,633
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	332,100,000	921,200,000	920,687,367	0	920,687,367	99.94	512,633
	JUMLAH BELANJA	56,533,051,000	58,557,620,000	45,648,708,135	180,350	45,648,527,785	77.95	12,909,092,215

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1900
SATUAN KERJA : 465672
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
SULAWESI SELATAN
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/26 10:14 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 30/4/26 8:06 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	9,286,099,000	7,792,099,000	7,791,948,900	0	7,791,948,900	100	150,100
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	103,000	128,000	116,676	350	116,326	90.88	11,674
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	484,620,000	510,974,000	510,741,630	0	510,741,630	99.95	232,370
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	161,142,000	171,062,000	170,883,480	0	170,883,480	99.9	178,520
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	103,810,000	99,410,000	99,335,000	0	99,335,000	99.92	75,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	40,560,000	33,000,000	32,880,000	180,000	32,700,000	99.09	300,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,005,000	38,977,000	38,517,515	0	38,517,515	98.82	459,485
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	444,657,000	444,370,000	444,369,120	0	444,369,120	100	880
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,559,061,000	1,208,300,000	1,174,876,000	0	1,174,876,000	97.23	33,424,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	409,865,000	389,935,000	389,900,000	0	389,900,000	99.99	35,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	12,491,922,000	10,688,255,000	10,653,568,321	180,350	10,653,387,971	99.67	34,867,029
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	41,530,000	930,145,000	930,143,900	0	930,143,900	100	1,100
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,000	32,000	18,047	0	18,047	56.4	13,953
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,151,000	51,957,000	51,910,860	0	51,910,860	99.91	46,140
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	829,000	18,596,000	18,511,090	0	18,511,090	99.54	84,910
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	7,560,000	7,560,000	0	7,560,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,041,000	65,396,000	65,395,260	0	65,395,260	100	740
511628	Belanja Uang Makan PPPK	8,436,000	238,417,000	233,441,000	0	233,441,000	97.91	4,976,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	2,590,000	61,280,000	60,885,000	0	60,885,000	99.36	395,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	68,140,000	1,373,383,000	1,367,865,157	0	1,367,865,157	99.6	5,517,843
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	800,000,000	251,737,000	178,213,000	0	178,213,000	70.79	73,524,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	8,000,000	70,000,000	69,992,000	0	69,992,000	99.99	8,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	808,000,000	321,737,000	248,205,000	0	248,205,000	77.15	73,532,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	14,251,872,000	14,971,677,000	14,971,616,709	0	14,971,616,709	100	60,291
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	62,180,000	1,143,603,000	1,143,602,253	0	1,143,602,253	100	747
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	14,314,052,000	16,115,280,000	16,115,218,962	0	16,115,218,962	100	61,038
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	27,682,114,000	28,498,655,000	28,384,857,440	180,350	28,384,677,090	99.6	113,977,910
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1900
SATUAN KERJA : 465672
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
SULAWESI SELATAN
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/26 10:14 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 30/4/26 8:06 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,375,100,000	4,238,400,000	1,758,681,752	0	1,758,681,752	41.49	2,479,718,248
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	18,810,000	33,810,000	33,801,554	0	33,801,554	99.98	8,446
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	185,352,000	198,312,000	183,312,000	0	183,312,000	92.44	15,000,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,020,041,000	1,168,141,000	438,588,014	0	438,588,014	37.55	729,552,986
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	4,611,303,000	5,650,663,000	2,414,383,320	0	2,414,383,320	42.73	3,236,279,680
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	2,159,010,000	3,520,399,000	2,842,716,442	0	2,842,716,442	80.75	677,682,558
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	52,920,000	39,960,000	0	0	0	0	39,960,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,028,455,000	5,769,000,000	1,650,239,000	0	1,650,239,000	28.61	4,118,761,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	6,240,385,000	9,329,359,000	4,492,955,442	0	4,492,955,442	48.16	4,836,403,558
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	154,029,000	154,029,000	64,239,141	0	64,239,141	41.71	89,789,859
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	154,029,000	154,029,000	64,239,141	0	64,239,141	41.71	89,789,859
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	996,000,000	672,221,000	671,382,164	0	671,382,164	99.88	838,836
522112	Belanja Langganan Telepon	38,400,000	1,400,000	1,281,384	0	1,281,384	91.53	118,616
522113	Belanja Langganan Air	102,000,000	90,600,000	90,598,200	0	90,598,200	100	1,800
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	576,000,000	687,464,000	685,973,118	0	685,973,118	99.78	1,490,882
522131	Belanja Jasa Konsultan	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
522141	Belanja Sewa	799,080,000	799,080,000	175,260,000	0	175,260,000	21.93	623,820,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,561,480,000	2,300,765,000	1,624,494,866	0	1,624,494,866	70.61	676,270,134
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,302,805,000	2,026,827,000	2,026,719,889	0	2,026,719,889	99.99	107,111
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,027,130,000	2,351,053,000	1,670,254,781	0	1,670,254,781	71.04	680,798,219
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	4,329,935,000	4,377,880,000	3,696,974,670	0	3,696,974,670	84.45	680,905,330
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,674,795,000	4,671,938,000	3,773,148,669	0	3,773,148,669	80.76	898,789,331
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	510,000,000	490,450,000	127,115,000	0	127,115,000	25.92	363,335,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,858,897,000	1,584,668,000	149,852,220	0	149,852,220	9.46	1,434,815,780
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	578,013,000	578,013,000	0	0	0	0	578,013,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	10,621,705,000	7,325,069,000	4,050,115,889	0	4,050,115,889	55.29	3,274,953,111
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	28,518,837,000	29,137,765,000	16,343,163,328	0	16,343,163,328	56.09	12,794,601,672
53	BELANJA MODAL							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1900
SATUAN KERJA : 465672
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
SULAWESI SELATAN
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 30/04/26 10:14 AM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 30/4/26 8:06 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	332,100,000	921,200,000	920,687,367	0	920,687,367	99.94	512,633
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	332,100,000	921,200,000	920,687,367	0	920,687,367	99.94	512,633
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	332,100,000	921,200,000	920,687,367	0	920,687,367	99.94	512,633
	JUMLAH BELANJA	56,533,051,000	58,557,620,000	45,648,708,135	180,350	45,648,527,785	77.95	12,909,092,215

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1900
SATUAN KERJA : 465672

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
SULAWESI SELATAN
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 30/04/26 10:14 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	267,481,000	33,520,233,661	0	33,520,233,661	12531.82
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	134,019,756	0	134,019,756	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	267,481,000	33,654,253,417	0	33,654,253,417	12,581.92
4255	Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika					
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	2,453,760,000	2,557,640,000	0	2,557,640,000	104.23
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	143,250,000	173,250,000	0	173,250,000	120.94
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4255	2,597,010,000	2,730,890,000	0	2,730,890,000	105.16
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,815	0	3,815	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	3,815	0	3,815	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	2,864,491,000	36,385,147,232	0	36,385,147,232	1,270.21
	JUMLAH PENDAPATAN	2,864,491,000	36,385,147,232	0	36,385,147,232	1,270.21

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (465672) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V

Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM

Tgl Cetak : 30/04/26 9:08 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET TETAP				
Tanah	24,371,699,525,000	24,371,699,525,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	57,187,141,591	56,266,454,224	920,687,367	1.64
Gedung dan Bangunan	49,590,666,913	49,590,666,913	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	48,159,798,956	48,159,798,956	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(102,288,143,123)	(98,886,312,247)	(3,401,830,876)	3.44
JUMLAH ASET TETAP	24,424,348,989,337	24,426,830,132,846	(2,481,143,509)	(0.01)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	41,870,000	41,870,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(41,870,000)	(41,870,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	24,424,348,989,337	24,426,830,132,846	(2,481,143,509)	(0.01)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Pendapatan Diterima Dimuka	24,108,601,665	5,369,900,294	18,738,701,371	348.96
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	24,108,601,665	5,369,900,294	18,738,701,371	348.96
JUMLAH KEWAJIBAN	24,108,601,665	5,369,900,294	18,738,701,371	348.96
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	24,400,240,387,672	24,421,460,232,552	(21,219,844,880)	(0.09)
JUMLAH EKUITAS	24,400,240,387,672	24,421,460,232,552	(21,219,844,880)	(0.09)
JUMLAH EKUITAS	24,400,240,387,672	24,421,460,232,552	(21,219,844,880)	(0.09)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	24,424,348,989,337	24,426,830,132,846	(2,481,143,509)	(0.01)

Keterangan :

FINAL

Maros, 30 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGUNA ANGGARAN

MOCHAMAD MAULUDIN

Pembina Utama Muda IV/c 196706131991121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (465672) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V

Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM

Tgl Cetak : 30/04/26 10:13 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	131111	Tanah	24,371,699,525,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	57,187,141,591	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	49,590,666,913	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	41,651,226,050	0
0.0	134112	Irigasi	5,979,891,181	0
0.0	134113	Jaringan	528,681,725	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	54,398,091,405
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	8,649,464,818
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	35,979,408,272
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	2,979,648,020
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	281,530,608
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	41,870,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	41,870,000
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	24,108,601,665
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	45,648,527,785
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	36,385,147,232	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,421,460,232,552
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	14,781,532,290
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	134,019,756
3.0	425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	2,557,640,000
3.0	425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	173,250,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,815
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	7,791,948,900	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	116,326	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	510,741,630	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	170,883,480	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	99,335,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	32,700,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	38,517,515	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	444,369,120	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,174,876,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	389,900,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	930,143,900	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	18,047	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	51,910,860	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	18,511,090	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (465672) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V

Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM

Tgl Cetak : 30/04/26 10:13 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	65,395,260	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	233,441,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	60,885,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	178,213,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	69,992,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	14,971,616,709	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,143,602,253	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,758,681,752	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	33,801,554	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	183,312,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	438,588,014	0
3.0	521211	Beban Bahan	2,842,716,442	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,650,239,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	671,382,164	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,281,384	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	90,598,200	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	685,973,118	0
3.0	522141	Beban Sewa	175,260,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,026,719,889	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,670,254,781	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3,773,148,669	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	127,115,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	149,852,220	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,364,795,224	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,104,946,684	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	516,145,943	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	404,684,998	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	11,258,027	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	33,037,596	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	31,201,545	0
JUMLAH			24,611,193,820,986	24,611,193,820,986

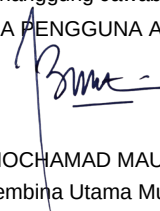
Keterangan :

FINAL

Maros, 30 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mma', with a horizontal line underneath.

MOCHAMAD MAULUDIN
Pembina Utama Muda IV/c

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (465672) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V

Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM
Tgl Cetak : 30/04/26 9:07 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	17,646,442,046	4,892,510,899	12,753,931,147	260.683
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	17,646,442,046	4,892,510,899	12,753,931,147	260.683
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	17,646,442,046	4,892,510,899	12,753,931,147	260.683
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	28,384,677,090	24,875,193,515	3,509,483,575	14.108
Beban Persediaan	33,037,596	160,069,005	(127,031,409)	(79.36)
Beban Barang dan Jasa	8,531,833,628	13,493,866,432	(4,962,032,804)	(36.773)
Beban Pemeliharaan	3,728,176,215	5,359,199,696	(1,631,023,481)	(30.434)
Beban Perjalanan Dinas	4,050,115,889	6,793,630,599	(2,743,514,710)	(40.384)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA : (465672) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V

Tgl Data : 30/04/26 7:28 AM

Tgl Cetak : 30/04/26 9:07 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,401,830,876	5,676,904,624	(2,275,073,748)	(40.076)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	48,129,671,294	56,358,863,871	(8,229,192,577)	(14.601)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(30,483,229,248)	(51,466,352,972)	20,983,123,724	(40.771)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	(6,034,819)	6,034,819	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	26,525,000	(26,525,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	32,559,819	(32,559,819)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,815	185,467	(181,652)	(97.943)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,815	185,467	(181,652)	(97.943)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3,815	(5,849,352)	5,853,167	(100.065)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(30,483,225,433)	(51,472,202,324)	20,988,976,891	(40.777)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(30,483,225,433)	(51,472,202,324)	20,988,976,891	(40.777)

Keterangan :

FINAL

Maros, 30 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mauludin', with a horizontal line underneath it.

MOCHAMAD MAULUDIN

Pembina Utama Muda IV/c

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

WILAYAH/PROVINSI : (1900) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (465672) KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V

Tgl Data : 30/04/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 30/04/26 9:07 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	24,421,460,232,552	24,431,190,376,684	(9,730,144,132)	(0.04)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(30,483,225,433)	(51,472,202,324)	20,988,976,891	(40.78)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(1,389,753,889)	1,389,753,889	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	(1,389,753,889)	1,389,753,889	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	9,263,380,553	43,131,812,081	(33,868,431,528)	(78.52)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(21,219,844,880)	(9,730,144,132)	(11,489,700,748)	118.08
EKUITAS AKHIR	24,400,240,387,672	24,421,460,232,552	(21,219,844,880)	(0.09)

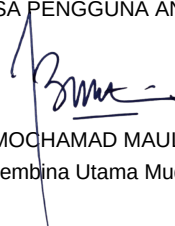
Keterangan :

FINAL

Maros, 30 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN


MOCHAMAD MAULUDIN
Pembina Utama Muda IV/c